

NGO

Wakil Presiden Ri Resmikan Pembukaan Aalco

David Fernanda Putra - KUDUS.NGO.WEB.ID

Oct 18, 2023 - 07:58



**AALCO Miliki
Pengaruh Besar
untuk Perjuangkan
Suara Asia – Afrika**

Bali - Senin (16/10) Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi

tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61. AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu hukum serta memperoleh pandangan dan posisi bersama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara di Asia dan Afrika. Forum ini dibentuk setelah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi salah satu penggagasnya.

AALCO hadir dan berakar dari semangat bahwa tata politik dan hukum internasional harus mencerminkan pandangan dan kepentingan bangsa Asia dan Afrika. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain dan memiliki posisi tawar yang kuat.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, kembali tegaskan peran besar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia-Afrika di Bali.

"AALCO harus mampu menawarkan solusi dan menjadi aktualisasi dari solusi itu sendiri sebagai kontribusi negara-negara Asia-Afrika guna merealisasikan tata dunia yang adil dan beradab," ujar Amin.

Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang ditunjuk sebagai Presiden dalam "61st Annual Session of AALCO" menyapaikan untuk mengobarkan semangat kerja sama antar negara-negara Asia-Afrika, dan komitmen visi Asia Afrika untuk bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik.

"Mari kita gunakan pertemuan ini untuk mengobarkan semangat kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika, serta sesi tahun ini merupakan bukti komitmen kita terhadap visi Asia-Afrika, bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik," ujar Yasonna.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengusulkan agenda diantaranya pembentukan _Asset Recovery expert forum_, Subtopik pada agenda _Law of the sea_ (_Illegal fishing as a Transnational Organized Crime_), dan Subtopik pada _Environment and Sustainable (Combating Transnational Wildlife Crime_ dan _Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Change_).